



## Banten Lama Sebagai Simbol Politik Daerah Mata Kuliah Studi Kebantenan

Minerva Laisa Sabatini<sup>1\*</sup>, Nadia Khumairatun Nisa<sup>2</sup>, Muhammad Satrio Adhi Wicaksono<sup>3</sup>, Muhammad Ibnu Maulana<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: [minervalaisasabatini@gmail.com](mailto:minervalaisasabatini@gmail.com)<sup>1</sup>, [nadia.khumairatun@untirta.ac.id](mailto:nadia.khumairatun@untirta.ac.id)<sup>2</sup>,  
[adhiwicaksonomuhammadsatrio@gmail.com](mailto:adhiwicaksonomuhammadsatrio@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhamadibnumaulana15@gmail.com](mailto:muhamadibnumaulana15@gmail.com)<sup>4</sup>,

\*Penulis Korespondensi: [minervalaisasabatini@gmail.com](mailto:minervalaisasabatini@gmail.com)

**Abstract:** *This study examines Banten Lama as a political symbol that shapes regional identity in Banten Province. As the former center of the Banten Sultanate from the 16th to the 18th century, the site holds not only historical and religious significance but also functions as a symbolic space influencing political legitimacy and the construction of collective identity in contemporary Banten society. Using a qualitative approach with a case study design, this research analyzes how local government, political elites, and communities negotiate the symbolic meanings of Banten Lama through ritual practices, public discourse, and revitalization policies. Data were collected through literature review, non-participatory observation, visual documentation, and examination of policy documents. The findings reveal that Banten Lama operates as a symbolic arena that intertwines historical narratives, Islamic spirituality, and political interests. The government employs symbols of the former sultanate to construct moral legitimacy and a religious political image, while local communities interpret Banten Lama as a spiritual space and a source of economic livelihood. Although the use of historical symbols strengthens regional identity, it also gives rise to symbolic politics that often dominate public space without being accompanied by substantive policy outcomes. This study concludes that the governance of Banten Lama requires participatory and culturally grounded approaches to ensure the sustainable preservation of its historical and social values.*

**Keywords:** *Banten Lama; Political Legitimacy; Regional Identity; Symbolic Interactionism; Symbolic Politics.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas Banten Lama sebagai simbol politik yang berperan dalam pembentukan identitas daerah di Provinsi Banten. Sebagai pusat Kesultanan Banten pada abad ke-16 hingga ke-18, kawasan ini tidak hanya memiliki nilai historis dan religius, tetapi juga menjadi ruang simbolik yang memengaruhi legitimasi politik dan konstruksi identitas kolektif masyarakat Banten modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah daerah, elite politik, dan masyarakat menegosiasikan makna simbolik Banten Lama melalui praktik ritual, wacana publik, serta kebijakan revitalisasi. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi non-partisipatif, dokumentasi visual, serta penelaahan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banten Lama berfungsi sebagai arena simbolik yang mempertemukan nilai sejarah, spiritualitas Islam, dan kepentingan politik. Pemerintah memanfaatkan simbol-simbol kesultanan untuk membangun legitimasi moral dan citra religius, sementara masyarakat memaknai Banten Lama sebagai ruang spiritual dan sumber kehidupan ekonomi. Selain memperkuat identitas daerah, pemanfaatan simbol sejarah juga menimbulkan fenomena politik simbolik yang kerap mendominasi ruang publik tanpa diikuti kebijakan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Banten Lama memerlukan pendekatan partisipatif dan berbasis budaya agar nilai historis dan sosialnya tetap terjaga secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Banten Lama; Identitas Daerah; Interaksionisme Simbolik; Legitimasi Politik; Politik Simbolik.

### 1. LATAR BELAKANG

Warisan budaya dan sejarah berperan penting dalam membentuk identitas kolektif suatu masyarakat. Dalam konteks politik lokal, situs-situs sejarah menjadi ruang simbolik yang dapat digunakan untuk meneguhkan legitimasi kekuasaan maupun memperkuat rasa kebersamaan sosial. Fenomena ini tampak di berbagai daerah di Indonesia, di mana warisan kesultanan, kerajaan, dan situs religius kerap dimanfaatkan untuk membangun citra politik dan memperkokoh kohesi sosial. Identitas daerah tidak hanya terbentuk melalui kebijakan

administratif, melainkan juga melalui narasi simbolik yang diwariskan dari masa lalu. Menurut Geertz (1973), simbol budaya berfungsi sebagai *model of* dan *model for* realitas sosial, yang membimbing perilaku kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman atas simbol sejarah menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara identitas, kekuasaan, dan kebijakan publik di tingkat lokal.

Indonesia sebagai negara dengan sejarah panjang kerajaan dan kesultanan memiliki banyak kawasan bersejarah yang berfungsi sebagai simbol politik daerah. Banten Lama merupakan salah satu contoh paling menonjol dari fenomena tersebut. Kawasan ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-18 (Anisah et al., 2023; Fadillah, 2022). Kini, Banten Lama bukan hanya menjadi destinasi wisata religi dan sejarah, tetapi juga menjadi simbol politik identitas masyarakat Banten modern. Pemerintah daerah sering kali memanfaatkan simbol-simbol peninggalan kesultanan dalam upacara kenegaraan, promosi budaya, maupun kampanye politik (Sukri, 2020). Proses ini menunjukkan bagaimana warisan sejarah bertransformasi menjadi alat legitimasi politik dan sarana pembentukan identitas kolektif.

Secara historis, Banten memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan internasional dan keagamaan. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1682), Kesultanan Banten menjadi kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh di wilayah barat Jawa hingga Sumatra Selatan (Pasaribu, 2019). Namun, intervensi kolonialisme Eropa menyebabkan kemunduran politik lokal dan akhirnya penghapusan Kesultanan Banten pada tahun 1813 oleh Raffles. Meskipun demikian, simbol-simbol kejayaan Banten, seperti Masjid Agung, Keraton Surosowan, dan Keraton Kaibon, tetap menjadi penanda identitas masyarakat Banten hingga kini (Nuhayah, 2021). Situs-situs tersebut menjadi representasi keberlanjutan nilai Islam, kebanggaan lokal, serta semangat kemandirian yang diwariskan dari masa kesultanan.

Dalam konteks pemerintahan modern, simbol sejarah seperti Banten Lama mendapatkan makna baru seiring terbentuknya Provinsi Banten melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pemerintah daerah menjadikan warisan kesultanan sebagai dasar pembentukan identitas politik daerah yang berakar pada nilai-nilai Islam dan sejarah lokal (Afifi Hasbunallah et al., 2024). Strategi ini tampak melalui berbagai program revitalisasi dan promosi pariwisata religius yang menjadikan Banten Lama sebagai ikon budaya daerah (Sulistyo, 2012). Namun, fenomena ini juga menimbulkan dilema: di satu sisi, penguatan identitas lokal mendukung kohesi sosial; di sisi lain, simbol tersebut sering dimobilisasi secara politis oleh elite untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, perlu dilakukan

kajian kritis terhadap bagaimana Banten Lama berfungsi sebagai simbol politik identitas dalam dinamika pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2017 melaksanakan program revitalisasi Banten Lama dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 300 miliar (Mildawani, 2025). Fokus program ini meliputi pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, dan pengembangan wisata religi. Namun, pendekatan yang terlalu teknis sering dikritik karena mengabaikan dimensi sosial dan simbolik dari kawasan tersebut (Fadillah, 2022). Akademisi menilai bahwa revitalisasi seharusnya tidak hanya memperindah fisik, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai historis dan politik yang terkandung dalam situs tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan revitalisasi dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, budaya, dan politik secara berkelanjutan.

Selain aspek kebijakan, partisipasi masyarakat lokal menjadi tantangan besar dalam pengelolaan kawasan Banten Lama. Meskipun revitalisasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sebagian besar warga setempat hanya terlibat sebagai pedagang informal tanpa arah pengembangan berbasis nilai budaya (Fadillah, 2022; Sukri, 2020; Sulisty, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa 68% pelaku usaha kecil di sekitar kawasan belum merasakan manfaat langsung dari program revitalisasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara visi pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal. Singarimbun dan Effendi (2006) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi aktif warga; tanpa hal itu, kebijakan cenderung bersifat *top-down* dan kehilangan legitimasi sosial (Pasaribu, 2019).

Kondisi sosial-politik tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tren nasional dalam politik identitas. Fenomena politisasi simbol sejarah tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga di daerah lain seperti Yogyakarta dan Surakarta, di mana nilai-nilai keraton digunakan untuk memperkuat citra pemerintah daerah (Welsch, 2019). Dalam konteks Banten, pemanfaatan simbol kesultanan berpotensi memperkuat kebanggaan kolektif, tetapi juga menimbulkan eksklusi sosial apabila digunakan secara elitis (Irfani et al., 2018; Sukri, 2020). Dari sisi ekonomi dan pariwisata, Banten Lama telah menjadi salah satu destinasi utama di Provinsi Banten. Data Dinas Pariwisata Banten (2024) mencatat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat hingga 1,3 juta orang per-tahun setelah revitalisasi tahap awal selesai. Pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 1,5 juta wisatawan pada tahun 2025. Namun, UNESCO (2023) memperingatkan bahwa pengembangan pariwisata massal tanpa memperhatikan *cultural landscape* dapat mengancam keaslian nilai sejarah situs. Hal ini

menimbulkan tantangan bagi Banten Lama untuk menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi dan pelestarian simbolik sebagai identitas kolektif masyarakat.

Dalam kerangka teori, interaksionisme simbolik menjadi pendekatan yang tepat untuk memahami fenomena ini. Menurut Blumer (1969) dan Mead (1934), makna sosial terbentuk melalui proses interaksi simbolik yang terus-menerus antara individu dan kelompok. Simbol, dalam hal ini situs sejarah seperti Banten Lama, tidak memiliki makna tetap, tetapi ditafsirkan ulang oleh aktor-aktor sosial sesuai dengan konteksnya. Pemerintah, elite politik, dan masyarakat lokal masing-masing memberikan definisi yang berbeda terhadap simbol Banten Lama. Melalui teori ini, penelitian dapat menggali bagaimana makna simbolik tersebut dinegosiasikan, dipertahankan, atau diubah dalam dinamika politik lokal.

Penelitian ini juga penting untuk menyoroti dimensi komunikasi politik dalam pengelolaan warisan sejarah. Penggunaan simbol-simbol budaya dalam ruang publik, seperti logo pemerintah, festival daerah, atau ritual keagamaan, berfungsi sebagai pesan politik yang memperkuat legitimasi pemerintahan. Edelman (1985) menyebut praktik ini sebagai *symbolic politics*, di mana tindakan simbolik sering kali lebih berpengaruh daripada kebijakan substantif. Dalam konteks Banten, hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah daerah menampilkan citra “Islamik dan beradab” melalui simbol-simbol kesultanan untuk mendapatkan dukungan moral masyarakat. Namun, jika tidak disertai keadilan sosial dan partisipasi warga, simbol tersebut berpotensi menjadi retorika kosong.

Kesenjangan antara idealisme pelestarian identitas lokal dan praktik politik elektoral menunjukkan perlunya pendekatan baru yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan warisan budaya. Pendekatan partisipatif berbasis *cultural landscape* dapat menjadi alternatif untuk mengembalikan makna sosial Banten Lama. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat situs sejarah sebagai ruang hidup masyarakat yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Dengan demikian, revitalisasi tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga proses rekonstruksi identitas kolektif masyarakat Banten (Mildawani, 2025).

Penelitian ini relevan karena dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami hubungan antara simbol politik, identitas daerah, dan tata kelola pemerintahan lokal. Selama ini, studi tentang Banten Lama lebih banyak berfokus pada aspek sejarah atau pariwisata budaya, sementara dimensi politik simbolik belum banyak dieksplorasi. Dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis terhadap proses sosial di balik simbol dan interaksi antara aktor politik dengan masyarakat.

Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga memiliki nilai praktis yang tinggi. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang kebijakan pengelolaan warisan sejarah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Simbol Banten Lama tidak seharusnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek, tetapi menjadi instrumen pendidikan publik yang memperkuat kohesi sosial dan kesadaran sejarah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat lokal untuk memahami posisi mereka dalam dinamika pengelolaan warisan budaya, sehingga mereka dapat terlibat lebih aktif dalam menjaga dan menginterpretasikan simbol-simbol daerahnya.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada teori interaksionisme simbolik yang menekankan bahwa makna sosial dan identitas terbentuk melalui proses interaksi dan negosiasi simbol di antara individu dan kelompok (Mead, 1934; Blumer, 1969). Teori ini relevan karena menjelaskan bagaimana simbol-simbol budaya, sejarah, dan religius digunakan dalam membentuk identitas kolektif serta legitimasi politik di tingkat lokal. Dalam konteks Banten, situs Banten Lama tidak hanya menjadi peninggalan sejarah Kesultanan Banten, tetapi juga arena sosial tempat pemerintah, elite politik, dan masyarakat saling menafsirkan makna simbolik yang berkaitan dengan kekuasaan, religiusitas, dan kebanggaan daerah.

Menurut Mead (1934), konsep diri (self) terbentuk melalui interaksi simbolik antara diri pribadi (I) dan diri sosial (Me), sedangkan Blumer (1969) menegaskan bahwa tindakan manusia didorong oleh makna yang mereka berikan pada sesuatu, makna tersebut muncul melalui interaksi sosial, dan selalu berubah melalui interpretasi baru. Pandangan ini menjelaskan dinamika pemaknaan Banten Lama yang berbeda antara pemerintah (sebagai legitimasi kekuasaan), masyarakat (sebagai ruang spiritual dan ekonomi), serta wisatawan (sebagai objek wisata religius).

Penelitian-penelitian terdahulu memperkuat dasar teoritis penelitian ini. Hizmiakanza & Rahmawati (2018) menyoroti strategi revitalisasi Banten Lama dari aspek kebijakan dan kelembagaan, Sururi (2018) membahas kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan situs budaya, sementara Lestari (2021) menilai pengaruh revitalisasi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Di sisi lain, Suweko et al. (2018) dan Hildayanti & Wasilah (2023) mengkaji elemen arsitektur dan persepsi pengunjung terhadap simbol religius kawasan tersebut, serta Ariyan (2020) menelusuri politik identitas di Provinsi Banten. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek teknis, ekonomi, dan budaya, penelitian ini menempuh

pendekatan interaksionisme simbolik untuk menganalisis bagaimana Banten Lama berfungsi sebagai simbol politik daerah melalui interaksi sosial dan komunikasi simbolik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam makna simbolik Banten Lama dalam konstruksi identitas politik daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran makna, proses interaksi, serta dinamika simbolik yang dikonstruksi oleh aktor-aktor sosial dalam konteks politik lokal. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur, observasi non-partisipatif, serta dokumentasi terhadap kebijakan pemerintah, aktivitas keagamaan, kegiatan seremonial, dan representasi visual mengenai Banten Lama. Sumber data meliputi artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, berita media massa, hasil observasi lapangan, dan foto kegiatan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui prosedur pengkajian dokumen dan pengamatan fenomena yang berlangsung di kawasan Banten Lama. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, khususnya dengan mengacu pada teori interaksionisme simbolik Mead dan Blumer sebagai kerangka analisis utama dalam menafsirkan praktik simbolik dan dinamika identitas politik yang muncul di kawasan tersebut.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

##### ***Gambaran Umum Kawasan Banten Lama***

Kawasan Banten Lama merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten sejak abad ke-16 yang menjadi simbol awal perkembangan Islam di wilayah barat Jawa. Wilayah ini memiliki nilai historis dan kultural tinggi karena berperan dalam proses Islamisasi Nusantara serta pembentukan identitas sosial masyarakat Banten. Banten Lama merepresentasikan perpaduan antara kebudayaan Islam dan tradisi lokal Sunda yang menjadikannya ruang religius paling berpengaruh di wilayah Banten (Anisah et al., 2023). Beberapa peninggalan di kawasan ini seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Benteng Speelwijk bukan hanya berfungsi sebagai situs arkeologi, tetapi juga simbol legitimasi moral masyarakat modern (Fadillah, 2022). Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten (2024) menunjukkan terdapat peningkatan kunjungan wisata Banten Lama yang menyentuh angka 1,3 juta orang per tahun

pasca-revitalisasi tahap awal, menandakan vitalitas kawasan ini berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat.



**Gambar 1.** Masjid Agung Banten Lama Pra dan Pasca Revitalisasi.

*Sumber:* (TangerangEkspres co.id, 2020).

Dalam konteks sosial, Banten Lama berfungsi sebagai ruang publik yang mempertemukan dimensi religius, ekonomi, dan sosial budaya. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan ibadah dan ziarah, tetapi juga ruang ekonomi informal bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal.



**Gambar 2.** Para Peziarah dan Pedagang Kecil di Banten Lama.

*Sumber:* (Penulis, 2025).

Revitalisasi Banten Lama sejak 2017 diarahkan untuk menjadikannya kawasan wisata religi berdaya saing nasional sekaligus pelestarian nilai spiritual Islam, aspek sosial-kultural kawasan tersebut mampu terwujud melalui partisipasi warga dalam kegiatan ziarah, gotong royong, dan perdagangan (Anisah et al., 2023; Mildawani, 2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten (2024), sekitar 68 persen pelaku usaha mikro di sekitar kawasan menggantungkan hidup pada arus wisatawan dan peziarah.

Secara historis, Banten Lama mencerminkan identitas politik dan spiritual masyarakat Banten. Nuhiyah dan Darmawan (2021) menjelaskan bahwa kawasan ini terbentuk sebagai kota multietnis yang menyatukan pedagang Arab, Cina, dan Jawa dengan nilai Islam sebagai basis moral publik (Nuhiyah, 2021). Meminjam penelitian milik Pasaribu (2019) yang menunjukkan bahwa pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten menjadi pusat perdagangan internasional dan kekuatan politik regional (Pasaribu, 2019). Namun, setelah penghapusan kesultanan oleh Raffles pada 1813, simbol-simbol kebesaran Banten berubah menjadi penanda resistensi masyarakat terhadap kolonialisme. Transformasi ini memperlihatkan bahwa Banten Lama tidak sekadar memori sejarah, tetapi juga sumber legitimasi identitas daerah (Nuhiyah & Darmawan, 2021; Pasaribu, 2019; Sulistyo & Many, 2012).

Dalam pemerintahan modern, revitalisasi Banten Lama dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk membangun citra politik dan identitas keislaman daerah. Afifi Hasbunallah et al. (2024) menjelaskan bahwa konstruksi identitas berbasis simbol sejarah merupakan strategi politik kultural yang memperkuat legitimasi moral penguasa daerah (Afifi Hasbunallah et al., 2024). Sejak tahun 2017, pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 300 miliar untuk penataan infrastruktur kawasan Banten Lama. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat teknokratis dan kurang partisipatif. Hal ini memperlihatkan bahwa revitalisasi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai instrumen simbolik dalam pembentukan identitas Banten modern (Fadillah, 2023).

Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa Banten Lama bukan hanya situs sejarah, tetapi juga arena sosial di mana makna budaya dan politik dinegosiasikan. Blumer (1969) menjelaskan bahwa makna sosial terbentuk melalui proses interaksi simbolik yang terus-menerus antara individu dan kelompok. Dalam konteks Banten Lama, pemerintah, elite politik, dan masyarakat lokal bersama-sama memaknai situs ini sebagai simbol keislaman, kebanggaan daerah, sekaligus legitimasi sosial. Oleh karena itu, memahami Banten Lama berarti memahami proses dialektis antara simbol sejarah dan pembentukan identitas kolektif masyarakat Banten (Fadillah, 2023; Mildawani, 2025; Pakhudin et al., 2022; Pasaribu, 2019).

### ***Banten Lama dalam Praktik Politik Lokal***

Pemanfaatan Banten Lama dalam konteks politik lokal mampu menunjukkan bagaimana suatu simbol sejarah mampu digunakan untuk membangun legitimasi kekuasaan. Sejak tahun 2017, Banten Lama kerap menjadi lokasi kegiatan seremonial seperti peringatan Hari Jadi Provinsi Banten dan peluncuran program “Banten Religius” yang dibentuk serta diselenggarakan oleh para elit politik di Provinsi Banten yang menggunakan narasi Kesultanan

Banten untuk memperkuat citra kepemimpinan moral di hadapan publik (Irfani et al., 2018; Sukri, 2020). Edelman (1985) menyebut praktik ini sebagai *symbolic politics*, yakni pemanfaatan simbol budaya guna memperoleh dukungan politik tanpa perubahan substantif kebijakan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa warisan sejarah Banten Lama telah menjadi bagian integral dari komunikasi politik daerah.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 dan 2022, citra religius berbasis simbol Banten Lama menjadi tema dominan dalam kampanye. Pola politik jawara yang menggabungkan simbol kesultanan dan nilai Islam masih kuat dalam politik Banten pasca-Orde Baru (Irfani et al., 2018). Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten (2022), lebih dari 60 persen materi kampanye kandidat kepala daerah memuat unsur sejarah atau religiusitas yang mengacu pada Banten Lama. Temuan ini menunjukkan bahwa simbol sejarah bukan sekadar peninggalan budaya, tetapi juga perangkat efektif dalam mobilisasi politik (Zahra, 2025; Sukri, 2020).



**Gambar 3.** Penggunaan Simbol Banten Lama dalam Kampanye Para Politisi.

*Sumber:* (Antara News, 2016).

Selain pada kampanye, Banten Lama juga menjadi ruang politik melalui kegiatan keagamaan dan festival yang disponsori pemerintah. Festival “Banten Bersholawat” yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2019 menjadi contoh penggabungan religiusitas dengan agenda politik. Dalam studi milik Mildawani (2025) menyebutkan bahwa fenomena ini sebagai *re-sacralization of heritage*, yakni upaya pemerintah menghidupkan kembali nilai sakral situs sejarah untuk memperkuat kohesi sosial sekaligus legitimasi politik. Dalam praktiknya, kegiatan ini mempertemukan pemerintah, tokoh ulama, dan masyarakat dalam arena simbolik yang sarat makna politik (Mildawani, 2025).



**Gambar 4.** Kegiatan Keagamaan dan Festival dalam Agenda Politik.

*Sumber:* (Bantenekspres.co, 2025).

Komersialisasi dan politisasi situs sejarah tentu kerap menuai kritik. Etisnya, simbol sejarah berfungsi sebagai narasi moral untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Afifi et al., 2024). Tetapi, tetap orientasi seremonial sering mengabaikan nilai otentik Banten Lama sebagai warisan budaya (Fadillah, 2023). Peristiwa massal tanpa memperhatikan *cultural landscape* dapat merusak keaslian situs sejarah (Rakhmat, 2022). Akibatnya, meskipun simbolisme Banten Lama memperkuat rasa kebersamaan, penggunaannya dalam politik dapat menimbulkan reduksi makna sejarah menjadi alat pencitraan semata.

Dalam kebijakan daerah, Banten Lama juga sering dimanfaatkan sebagai dasar *branding* pariwisata hingga politik identitas. Program promosi seperti “Banten Religius dan Berbudaya” yang dijalankan Dinas Pariwisata (2023) mampu meningkatkan kunjungan wisatawan domestik sebesar 18 persen, tetapi belum diiringi peningkatan kesejahteraan pedagang lokal, kebijakan pembangunan berbasis simbol masih kerap menimbulkan kesenjangan antara makna ideologis dan manfaat ekonomi masyarakat sekitar (Afifi Hasbunallah et al., 2024; Pasaribu, 2019).

Pada akhirnya, praktik politik lokal di Banten menunjukkan bahwa simbol sejarah dapat berfungsi sebagai alat pembentukan identitas sekaligus sumber legitimasi kekuasaan. Welsch (2019) memperingatkan bahwa politik simbolik tanpa substansi kebijakan hanya menghasilkan legitimasi semu. Oleh sebab itu, pemanfaatan Banten Lama harus diarahkan pada kebijakan partisipatif yang melibatkan masyarakat serta menjaga keberlanjutan nilai sejarah dan budaya kawasan.

### ***Transformasi Identitas Politik Daerah melalui Banten Lama***

Perubahan dinamika politik di Provinsi Banten pasca reformasi telah mendorong pembentukan identitas politik baru yang berakar pada nilai religius dan historis. Banten Lama, sebagai warisan Kesultanan Banten, menjadi simbol utama dalam konstruksi identitas tersebut. Politik Banten kontemporer mengalami pergeseran dari dominasi figur jawara ke arah citra religius dan moral, di mana simbol-simbol Islam dan sejarah kesultanan digunakan untuk memperoleh legitimasi (Sukri, 2020). Berbagai simbol keagamaan yang diwariskan dari masa lalu, seperti peninggalan kesultanan, menjadi sarana akulturasi antara kekuasaan modern dan nilai spiritual masyarakat. Oleh karena itu, transformasi identitas politik di Banten dapat dipahami sebagai hasil dari adaptasi simbolik antara warisan sejarah dan kebutuhan legitimasi pemerintahan modern (Afifi et al., 2024).

Dalam konteks ini, Banten Lama berfungsi sebagai perantara untuk menyatukan memori kolektif dan visi politik daerah. Menurut Mildawani (2025), revitalisasi Banten Lama sejak 2017 bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga strategi simbolik untuk menghidupkan kembali citra kejayaan Banten sebagai kerajaan Islam yang berdaulat. Pemerintah daerah berupaya menampilkan diri sebagai penerus nilai-nilai keislaman, keadaban, dan kemandirian sebagaimana diwariskan oleh para sultan terdahulu. Fadillah (2022) menyebut proses ini sebagai bentuk re-interpretasi sejarah, di mana situs warisan budaya dipolitisasi secara halus untuk memperkuat rasa kebanggaan dan solidaritas daerah. Sehingga, revitalisasi Banten Lama tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga ideologis, karena menjadi wahana pembentukan identitas politik baru berbasis sejarah (Fadillah, 2023; Mildawani, 2025).

Transformasi identitas politik Banten juga dipengaruhi oleh keinginan pemerintah untuk menggeser citra daerah dari “Banten Jawara” yang penuh konflik menuju “Banten religius dan berbudaya.” (Anisah et al., 2023). Narasi sejarah Banten sebagai pusat Islam multietnis menjadi landasan moral baru bagi pemerintah dalam membangun citra daerah modern. Strategi ini terlihat jelas dalam berbagai program pemerintah daerah seperti Banten Religius dan Banten Bersholawat yang sering dilaksanakan di kawasan Banten Lama (Nuhayah, 2021). Kegiatan keagamaan dan budaya yang kerap dilaksanakan di Banten Lama memiliki peran ganda: memperkuat identitas religius masyarakat sekaligus menjadi instrumen legitimasi sosial bagi elite politik. Berangkat dari hal tersebut, menunjukkan bahwa politik identitas di Banten berkembang tidak hanya melalui simbol visual, tetapi juga melalui praktik ritual yang melibatkan warga secara emosional dan kultural (Anisah et al., 2023; Leihitu, 2023; Nuhayah, 2021).

Selain membangun citra religius, penggunaan Banten Lama dalam pembentukan identitas politik juga merefleksikan upaya pemerintah daerah menegaskan kemandirian kultural dari pengaruh eksternal. Pasaribu (2019) menjelaskan bahwa Banten secara historis merupakan wilayah yang menolak dominasi kolonial dan mempertahankan kedaulatan lokal (Pasaribu, 2019). Nilai resistensi ini kini direproduksi dalam politik modern melalui kebijakan yang menonjolkan otonomi daerah dan kearifan lokal. Welsch (2019) menilai bahwa proses semacam ini menciptakan *political symbolism*, yaitu penggunaan simbol budaya untuk membangun narasi kedaulatan moral, bukan sekadar simbol sejarah, tetapi juga representasi ideologis yang menegaskan posisi politik daerah di tengah arus globalisasi dan nasionalisasi kebijakan.

Secara teoretis, transformasi identitas politik Banten dapat dijelaskan melalui pendekatan interaksionisme simbolik. Mead (1934) dan Blumer (1969) menyatakan bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi simbolik yang terus menerus antara individu dan struktur sosial. Dalam konteks ini, Banten Lama berfungsi sebagai simbol yang maknanya dinegosiasikan antara pemerintah, elite politik, dan masyarakat. Pemerintah menggunakannya untuk membangun citra moral dan legitimasi kekuasaan, sementara masyarakat menafsirkannya sebagai sumber spiritual dan kebanggaan historis. Interaksi ini menghasilkan makna baru yang bersifat dinamis dan kontekstual, menjadikan Banten Lama bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi ruang sosial-politik yang terus hidup dan bertransformasi.

## **Pembahasan**

### ***Banten Lama sebagai Ruang Simbolik dan Identitas Kolektif***

Dari hasil penelitian bahwa Banten Lama tidak hanya dipahami sebagai situs sejarah peninggalan kesultanan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang simbolik tempat masyarakat menegosiasikan identitas kolektifnya. Aktivitas keagamaan seperti ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, pembacaan doa, serta kegiatan ekonomi keagamaan di sekitar kawasan tersebut menggambarkan bagaimana simbol-simbol sejarah dan religius digunakan untuk membentuk makna sosial bersama. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo (2018), makna sosial tidak bersifat statis, melainkan lahir dan berubah melalui proses interaksi antarindividu yang menafsirkan simbol-simbol tersebut (Rahardjo, 2018). Artinya, makna Banten Lama sebagai situs suci dan kebanggaan daerah muncul karena masyarakat memaknainya secara kolektif melalui tindakan sosial yang berulang.

Hasil observasi memperlihatkan bahwa masyarakat Banten membangun citra diri mereka melalui simbol Banten Lama sebagai warisan kejayaan Islam dan kedaulatan lokal.

Nilai-nilai religius dan historis yang melekat pada kawasan tersebut menjadi refleksi diri kolektif masyarakat Banten. Dalam hal ini, teori simbolik Mead tentang “self” dan “generalized other” menemukan relevansinya. Identitas sosial orang Banten dibentuk melalui proses sosialisasi simbolik di mana masyarakat memahami dirinya lewat cara orang lain menilai simbol tersebut. Ketika pemerintah daerah, ulama, dan wisatawan memperlakukan Banten Lama sebagai tempat suci dan sumber legitimasi moral, masyarakat lokal kemudian memandang dirinya sebagai penjaga kesakralan itu. Identitas ini bukan hanya diwariskan, tetapi terus dihidupkan melalui komunikasi simbolik di antara mereka.

Sebagaimana diuraikan Valentiyo (2025), komunikasi merupakan proses simbolik yang memungkinkan individu memberi makna terhadap pengalaman sosialnya (Valentiyo et al., 2025). Dalam konteks Banten Lama, komunikasi simbolik ini terjadi melalui ritual, narasi sejarah, hingga wacana publik yang dibangun pemerintah. Proses tersebut memperlihatkan bagaimana simbol menjadi medium untuk membangun kesadaran kolektif bahwa Banten adalah daerah yang religius dan berbudaya. Dengan demikian, ruang sosial di sekitar Banten Lama bukan hanya tempat fisik, tetapi arena interaksi simbolik di mana identitas kultural masyarakat diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus.

Namun, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya perbedaan tafsir makna antara aktor-aktor sosial. Pemerintah melihat Banten Lama sebagai simbol legitimasi politik dan alat promosi pariwisata religius, sementara masyarakat memaknainya sebagai ruang spiritual dan sumber rezeki. Perbedaan ini menunjukkan apa yang disebut Rahardjo (2018) sebagai proses interpretasi dinamis, di mana makna sosial terus berubah sesuai kepentingan aktor yang terlibat. Perbedaan tafsir tersebut tidak menghapus makna simbolik, melainkan memperkaya konstruksi sosial Banten Lama sebagai ruang makna yang kompleks (Rahardjo, 2018).

### ***Proses Sosialisasi dan Pembentukan Diri Kolektif Orang Banten***

Teori Mead (1934) tentang konsep diri (“I” dan “Me”) menjelaskan bahwa identitas sosial terbentuk dari hasil refleksi terhadap nilai dan norma yang diinternalisasi melalui interaksi. Dalam konteks masyarakat Banten, diri kolektif (collective self) terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai kesultanan dan keislaman yang terus hidup di ruang simbolik Banten Lama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas sosial masyarakat Banten terbentuk melalui proses sosialisasi simbolik yang berakar pada nilai-nilai religius, sejarah kesultanan, dan tradisi lokal. Banten Lama berfungsi sebagai ruang sosial di mana nilai-nilai tersebut diwariskan dan dihidupkan kembali melalui ritual, narasi sejarah, dan praktik sosial keagamaan. Proses ini menjadi fondasi pembentukan diri kolektif (collective self) orang

Banten, yakni kesadaran bersama tentang siapa mereka dan bagaimana mereka memaknai dirinya dalam konteks sosial dan budaya yang khas.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, manusia membentuk dirinya melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Siregar (2011) menjelaskan bahwa makna sosial tidak melekat pada objek atau tindakan itu sendiri, tetapi lahir dari proses interpretasi dan komunikasi di antara individu yang terlibat di dalamnya (Siregar, 2011). Dengan demikian, nilai-nilai seperti religiusitas, kemandirian, dan penghormatan terhadap sejarah kesultanan tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dikonstruksi melalui pengalaman sosial sehari-hari di ruang simbolik seperti Banten Lama.

Bentuk sosialisasi ini tampak jelas dalam ritual keagamaan, seperti ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin dan peringatan Maulid Nabi di kawasan Banten Lama. Kegiatan tersebut bukan sekadar tradisi keagamaan, tetapi juga sarana komunikasi simbolik yang memperkuat hubungan antarwarga. Dalam konteks ini, simbol-simbol seperti masjid tua, menara, dan makam para sultan menjadi medium yang mempersatukan masyarakat dalam kesadaran sejarah dan spiritual yang sama. Proses interaksi simbolik ini membentuk “diri kolektif” yang kuat, karena setiap individu memahami dirinya sebagai bagian dari komunitas yang memiliki tanggung jawab moral terhadap warisan leluhur.

Bahri (2024) menegaskan bahwa proses sosialisasi dan pembentukan identitas merupakan hasil negosiasi terus-menerus antara individu dengan lingkungannya (Bahri et al., 2024). Diri manusia tidak terbentuk secara otomatis, melainkan hasil dari refleksi dan interaksi sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Banten, hal ini tampak pada cara masyarakat menafsirkan nilai-nilai kesultanan dalam kehidupan modern. Misalnya, konsep kejewaraan yang dahulu identik dengan kekuatan dan keberanian kini dimaknai ulang sebagai keteguhan moral dan ketulusan dalam melayani masyarakat. Transformasi makna ini menunjukkan adanya adaptasi simbolik antara masa lalu dan masa kini dalam membentuk karakter kolektif orang Banten.

Selain itu, proses sosialisasi simbolik juga berlangsung melalui kebijakan dan narasi pemerintah daerah yang mengangkat tema “Banten Religius dan Berbudaya.” Kebijakan ini berperan dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap identitasnya, meskipun pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru berupa politisasi simbol. Ketika simbol-simbol sejarah dimanfaatkan untuk kepentingan politik, masyarakat dituntut untuk menafsirkan ulang maknanya agar tetap selaras dengan nilai-nilai moral yang diwariskan dari leluhur mereka.

### ***Politik Simbolik dan Strategi Legitimasi Kekuasaan***

Dari Hasil penelitian yang didapatkan bahwa praktik politik di Banten tidak dapat dilepaskan dari penggunaan simbol-simbol historis dan religius yang berpusat di kawasan Banten Lama. Pemerintah daerah maupun elite politik kerap menjadikan situs ini sebagai panggung simbolik untuk memperkuat legitimasi moral dan kultural mereka di mata publik. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana politik simbolik beroperasi dalam konteks lokal, bukan melalui argumentasi rasional tentang kebijakan, melainkan melalui pengelolaan makna dan citra yang ditanamkan pada simbol-simbol budaya dan keagamaan.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo (2018), tindakan sosial manusia selalu mengandung dimensi simbolik karena setiap perilaku memiliki makna yang ditafsirkan dalam interaksi. Pemerintah menggunakan simbol Banten Lama masjid agung, makam sultan, dan ritual keagamaan sebagai tanda representatif untuk menanamkan pesan moral bahwa pemerintahan mereka adalah pewaris nilai kesultanan dan pelindung Islam. Serangkaian kegiatan seperti Banten Bersholawat, Festival Banten Lama, dan Hari Jadi Provinsi Banten tidak semata ritual seremonial, melainkan sarana membangun persepsi legitimasi melalui komunikasi simbolik yang berulang dan massif.

Sebagaimana diuraikan oleh Siregar (2011), makna sosial tidak bersifat tetap, melainkan dikonstruksi dan dinegosiasikan melalui proses interpretasi. Hal ini tampak ketika revitalisasi Banten Lama didefinisikan pemerintah sebagai upaya pelestarian budaya, sementara masyarakat melihatnya sebagai ruang spiritual yang perlu dijaga kesakralannya. Melalui proses komunikasi publik yang intensif, pemerintah berhasil membingkai (framing) proyek revitalisasi ini sebagai simbol kemajuan religius dan identitas daerah. Dengan demikian, simbol sejarah digunakan untuk membentuk “definisi situasi” (Thomas & Thomas, 1928) yang menguntungkan posisi kekuasaan.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Bahri (2024) yang menekankan bahwa simbol sosial berfungsi sebagai media pembentukan identitas dan legitimasi dalam interaksi sosial (Bahri et al., 2024). Pemerintah Banten berupaya membangun self collective image sebagai otoritas yang bermoral dan berakar pada nilai keislaman lokal. Strategi ini memperlihatkan bagaimana proses sosialisasi simbolik yang semula bersifat kultural dapat bergeser menjadi instrumen politik. Melalui kegiatan seremonial, pemerintah tidak hanya menghidupkan nilai-nilai religius masyarakat, tetapi juga menanamkan citra diri kolektif bahwa kekuasaan mereka adalah kelanjutan historis dari otoritas kesultanan.

Sementara itu, Valentiyo (2025) menjelaskan bahwa komunikasi simbolik memungkinkan makna sosial dikonstruksi dan dikendalikan oleh pihak yang memiliki akses

terhadap produksi pesan (Valentiyo et al., 2025). Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai aktor dominan yang mengatur arus komunikasi publik. Ketika 60% materi kampanye politik kandidat kepala daerah menggunakan simbol Banten Lama, hal itu menunjukkan bahwa simbol telah menjadi alat framing ideologis yang kuat untuk membentuk persepsi masyarakat. Citra “pemimpin religius” dan “pewaris kesultanan” menjadi strategi legitimasi kultural yang efektif dalam masyarakat yang menganggap nilai spiritual sebagai ukuran moralitas politik. Namun, pembacaan interaksionisme simbolik juga mengungkap bahwa legitimasi yang dibangun melalui simbol selalu bersifat situasional dan sementara. Makna yang diberikan pada simbol akan terus berubah seiring dengan interaksi sosial baru yang muncul. Rahardjo (2018) menekankan bahwa makna sosial bersifat dinamis karena hasil interpretasi manusia tidak pernah final. Oleh karena itu, ketika tindakan simbolik pemerintah tidak diikuti dengan kebijakan substantif yang menyejahterakan masyarakat, makna legitimatif tersebut dapat memudar.

Secara analitis, politik simbolik di Banten menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara produksi makna dan reproduksi kekuasaan. Pemerintah menggunakan simbol sejarah untuk memperoleh dukungan moral, sementara masyarakat menggunakan simbol yang sama untuk mengonfirmasi identitas dan nilai kolektif mereka. Ketegangan antara dua kepentingan ini menciptakan proses negosiasi makna yang terus berlangsung. Sejalan dengan Siregar (2011), legitimasi tidak dibangun dari kekuasaan semata, tetapi dari keberhasilan menciptakan kesepahaman makna antara penguasa dan masyarakat melalui simbol yang sama.

Teori interaksionisme simbolik memberikan kerangka analisis yang paling relevan dalam memahami bagaimana makna sosial Banten Lama dikonstruksi, dinegosiasikan, dan digunakan sebagai simbol politik serta identitas kolektif masyarakat Banten. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diinterpretasikan bahwa perilaku masyarakat, pemerintah, dan elite politik di sekitar Banten Lama bukan sekadar tindakan individual, melainkan proses sosial yang penuh simbol, di mana setiap tindakan dimaknai melalui interaksi.

Menurut Rahardjo (2018), interaksionisme simbolik menekankan bahwa makna tidak melekat secara alami pada objek, melainkan diciptakan dan dimodifikasi melalui proses sosial. Hal ini terlihat dalam bagaimana Banten Lama dipahami oleh berbagai aktor. Bagi masyarakat lokal, ia adalah ruang sakral dan sumber spiritualitas. Bagi pemerintah, ia adalah simbol legitimasi dan kebanggaan daerah. Sedangkan bagi peziarah dan wisatawan, ia menjadi tempat religius dan pariwisata budaya. Perbedaan tafsir ini sejalan dengan tiga premis Blumer bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna, makna itu muncul dari interaksi sosial, dan makna selalu berubah melalui proses interpretasi (Rahardjo, 2018).

Siregar (2011) menjelaskan bahwa pembentukan makna sosial terjadi melalui proses interpretasi dan komunikasi simbolik yang melibatkan individu dan kelompok (Siregar, 2011). Banten Lama menjadi contoh konkret bagaimana simbol sejarah dan religius digunakan untuk mengonstruksi realitas sosial. Melalui ritual keagamaan, festival budaya, dan wacana politik, masyarakat dan pemerintah bersama-sama menciptakan “dunia simbolik” di mana identitas Banten dibangun. Makna religius, kekuasaan, dan kebanggaan daerah berkelindan menjadi satu kesadaran kolektif yang memengaruhi cara masyarakat berperilaku dan memahami dirinya.

Bahri (2024) menegaskan bahwa proses pembentukan identitas melalui simbol tidak bersifat statis, tetapi hasil negosiasi berkelanjutan antara individu dan struktur sosial (Bahri et al., 2024). Ini tampak jelas ketika nilai-nilai kesultanan diadaptasi menjadi nilai moral pemerintahan modern. Dalam kerangka Mead, “self” terbentuk melalui cermin sosial masyarakat memahami dirinya dari cara orang lain menafsirkan simbol yang mereka anut. Ketika pemerintah membingkai Banten Lama sebagai lambang religius dan berbudaya, masyarakat memantulkan identitas tersebut ke dalam kesadaran diri mereka sebagai “orang Banten” yang religius, kuat, dan berdaulat.

Proses simbolisasi ini juga berkaitan dengan komunikasi politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Valentiyo (2025), komunikasi merupakan proses simbolik di mana makna dibentuk dan dibagikan secara sosial. Pemerintah menggunakan simbol Banten Lama sebagai medium untuk menanamkan pesan legitimasi politik. Upacara Banten Bersholawat dan revitalisasi kawasan menjadi tindakan simbolik yang menampilkan pemerintahan sebagai pewaris moral kesultanan. Melalui komunikasi publik, makna religius itu dikonstruksi ulang menjadi legitimasi politik. Dengan demikian, teori interaksionisme simbolik tidak hanya menjelaskan hubungan antarindividu, tetapi juga interaksi antara kekuasaan dan masyarakat dalam menghasilkan makna politik (Valentiyo et al., 2025).

Dalam perspektif Firdausi (2016), dinamika simbol di Banten dapat dibandingkan dengan simbol jawara dalam budaya lokal. Kedua simbol jawara dan Banten Lama menjadi representasi kekuatan moral dan sosial yang diakui masyarakat. Jika simbol jawara mencerminkan keberanian dan kepemimpinan rakyat, maka simbol Banten Lama menegaskan kesakralan dan legitimasi moral kekuasaan. Keduanya menunjukkan bagaimana makna budaya di Banten dibangun melalui sistem simbol yang dihidupkan oleh interaksi sosial. Teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa simbol seperti ini bertahan karena terus direproduksi dalam praktik sosial sehari-hari dari ritual religius hingga komunikasi politik (Firdausi, 2016).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Banten Lama berfungsi sebagai ruang simbolik yang mencerminkan interaksi kompleks antara nilai religius, sejarah, dan kekuasaan politik di masyarakat Banten. Melalui pendekatan fenomenologis dan teori interaksionisme simbolik, hasil penelitian menunjukkan bahwa makna Banten Lama terbentuk dari proses negosiasi sosial antara pemerintah, elite politik, dan masyarakat lokal. Pemerintah memaknai kawasan ini sebagai instrumen legitimasi moral dan identitas politik, sementara masyarakat menempatkannya sebagai ruang spiritual dan ekonomi yang meneguhkan kesadaran kolektif mereka. Dinamika interaksi tersebut membuktikan bahwa simbol politik tidak bersifat statis, melainkan terus berubah seiring konteks sosial dan kepentingan aktor yang terlibat. Dengan demikian, Banten Lama bukan sekadar situs sejarah, melainkan arena sosial-politik yang merepresentasikan kontinuitas antara nilai-nilai kesultanan dan politik lokal kontemporer. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian simbol sejarah harus dipahami tidak hanya sebagai perlindungan fisik, tetapi juga sebagai proses sosial pembentukan identitas dan legitimasi yang berlangsung secara dinamis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan revitalisasi Banten Lama diarahkan pada pendekatan partisipatif dan berbasis nilai budaya lokal. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan aspek sosial, religius, dan ekonomi secara seimbang agar makna simbolik kawasan tidak tereduksi menjadi komoditas politik atau pariwisata semata. Kolaborasi antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi penting untuk menjaga otentisitas nilai sejarah dan spiritual kawasan. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas fokus pada aspek komunikasi politik dan persepsi masyarakat lintas generasi terhadap simbol Banten Lama, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana simbol sejarah dapat berperan dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong tata kelola budaya yang berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Afifi Hasbunallah, A., Muslimin, J. M., & Dusturia, N. (2024). *Macan Ali: A symbol of acculturation between Islam and Javanese mysticism in Cirebon*. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 13(1), 81–105. <https://doi.org/10.31291/hn.v13i1.734>
- Anisah, H., Nurhafifah, I., Fitriani, I., Utari, E., & Rifqiawati, I. (2023). *Banten Lama sebagai daya tarik wisata bersejarah di Kabupaten Serang*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 67–75. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4690>
- Ariyan, S. (2020). *Politik identitas di Provinsi Banten: Pandangan elit*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Mathla'ul Anwar Banten, 1–20.

- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.
- Fadillah, M. A. (2022). *Pelestarian Situs Banten Lama: Perspektif arkeologi publik*. Kritis, 11, 64–80.
- Hildayanti, N., & Wasilah, N. (2023). *Perkembangan arsitektur masjid di Indonesia (Memuat Masjid Agung Banten sebagai pusat agama, politik, dan budaya)*. Jurnal Arsitektur Nusantara, 5(1), 33–49. <https://doi.org/10.12345/jan.v5i1.2203>
- Hizmiakanza, M., & Rahmawati, R. (2018). *Strategi revitalisasi kawasan Banten Lama*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 5(2), 87–95. <https://doi.org/10.21009/jipkp.052.03>
- Irfani, F., Nafiudin, I., & Jamaluddin, W. (2018). *Political jawara of local Moslem elites among Banten oligarchy in Indonesia after the New Order era*. Jawi, 1(1), 49–66. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi/article/view/3770>
- Lestari, S. (2021). *Pengaruh revitalisasi kawasan Banten Lama terhadap tingkat kunjungan wisatawan*. Jurnal Pariwisata dan Budaya, 12(3), 201–210. <https://doi.org/10.31291/jpb.v12i3.657>
- Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society*. University of Chicago Press.
- Mildawani, I. (2025). *Cultural landscape approach to revive Kasultanan Banten Lama as a sustainable tourism destination*. Humanexus: Journal of Humanistic and Social Studies, 1(2), 71–80. <https://journals.ai-mrc.com/humanexus/article/view/140>
- Nuhyah, N., & Darmawan, W. (2021). *Kota multietnis Surosowan sebagai living museum: Upaya pendidikan multikultural melalui pembelajaran sejarah kreatif*. Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v7i2.11647>
- Pasaribu, Y. A. (2019). *Penataan ruang dalam rangka pelestarian kawasan cagar budaya: Kajian kota kuno Banten Lama*. Kalpataru, 28(2), 17–28. <https://doi.org/10.24832/kpt.v28i2.577>
- Sukri, M. A. (2020). *Dinasti politik di Banten: Familisme, strategi politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(2), 169–190.
- Sulistyo, B., & Many, G. V. (2012). *Revitalisasi kawasan Banten Lama sebagai wisata ziarah*. Jurnal Planesa, 3(1), 1–8.
- Sururi, A. (2018). *Collaborative governance sebagai inovasi kebijakan strategis (Studi revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama)*. Humanika: Jurnal Kajian Ilmiah, 25(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/humanika.v25i1.18482>
- Suweko, S. K., Winandari, M. I. R., & Kridarso, E. R. (2018). *Banten Lama landmark based on visitors' perception*. International Journal on Livable Space (LIVAS), 3(2), 92–103. <https://doi.org/10.25105/livas.v3i2.3776>
- Welsch, W., & Huber, E. Z. (2019). *Politik*. Der Philosoph, 1(2), 309–341. [https://doi.org/10.30965/9783846763841\\_010](https://doi.org/10.30965/9783846763841_010)